

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Butar, Franky. (2022). Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press
- Elsi, Sutri destemi. (2023). Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Hadi, Dani prianto. (2022). Implementasi hukum pertambangan Indonesia, Jawa tengah: Eureka Media Aksara
- Marzuki, P. M. (2020). Teori hukum. Jakarta: Prenada Media
- Ramadhani, Khusnul, dkk. (2023). Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sushanty, V. R. (2020). Buku ajar mata kuliah hukum perijinan fakultas hukum universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya: Ubhara Press.
- Yanto, N. (2018). Pengantar hukum lingkungan di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih. (2021). Reformasi birokrasi di Indonesia, sebuah tinjauan literatur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2).
- Anggraini, D., & Islami, S. (2023). Penerapan good mining practice pada aktivitas pertambangan emas di Sumatera Barat, *Jurnal Menara Ilmu*, 17(2).
- Bastiana Darongke, F. J., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, 10(3).
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11).
- Juaningsih, Imas Novita. (2020). Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(3)
- Razy, Muhammad Fahrul. (2022). Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3)
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino susanti & kamal fahmi. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin, *Jurnal marwah hukum*, 1(1)
- Ratri Adinda Putri, M., Sadino, & Suartini. (2023). Tinjauan hukum atas kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi pemegang izin usaha pertambangan, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4).

- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2).
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3).
- Sumanngi, Darmin. (2023). Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan, *Humaniorum journal*, 1(1)
- Suryaningsih, Ayuk. (2023). Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba, *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(2)
- Tapada, Risenly. (2022). Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan, *Jurnal Lex Privatum*, 10(4)
- Wahyudin, Uyu. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Atsar*, 1(1)
- Wulandari, Rika Putri, Muhammad helmi Fahrozi. (2021). Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, *Jurnal sosial dan budaya*, 8(1)
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi normatif dan perbandingannya). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 10(2).

Internet

- Ade Pradiansyah, A. (2020). Tafsir surat Al-Baqarah ayat 205: Tuhan tidak menyukai kerusakan terjadi di bumi. Diakses dari <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-205-tuhan-tidak-menyukai-kerusakan-terjadi-di-bumi/>
- Apriliawan, R. (2019). Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan
- Idris, F. A. (2020). Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54079428#:~:text=%22Danau%20Biru%22%20adalah%20lubang%20bekas%20tambang%20di%20Kabupaten,tambang%20>
- Jaringan Advokasi Tambang. (2021). Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, jatuh lagi korban lubang tambang ke-40. Diakses dari <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). Peta perizinan tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%2>

0Sumber%20Daya%20Mineral,IUP%2C%201%20IUPK%2C%201%20K
K%2C%20dan%2037%20PKP2B

- Pradipta Rindu. (2023). Pelepasan kawasan hutan di Kaltim ancam lingkungan dan masyarakat. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/07/pelepasan-kawasan-hutan-di-kalimantan-timur-mengancam-lingkungan-dan-masyarakat>
- Putri, D. S. (2022). Soal tambang ilegal di Kaltim, JATAM tuntutan hal ini ke pemerintah. Diakses dari <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>
- Rusdi, & Amanah, F. (n.d.). Perencanaan, poin penting reklamasi dan pascatambang. Diakses dari <https://nikel.co.id/farisatul-amanah-perencanaan-poin-penting-reklamasi-dan-pascatambang/>
- Yovanda. (2024). Lagi, dua nyawa melayang di lubang tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang dan batu bara di provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang izin pemanfaatan pertambangan